

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Firmansyah (2010), Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System, Yogyakarta: Idea Pres.
- Harun M.Husen (1990) Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartanti, Evi, S.H., (2005). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika : Jakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad, (2017), op.cit., H. 169-170
- IGM Nurdjana (2010), Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kwik Kian Gie.( 2003), Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran,Kesejahteraan dan Keadilan, Jakarta: edisi kedua
- Matin (2014), Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marwan Effendy (2007), Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.Ghalia Indonesia.
- Moeljatno (1993), Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya: Putra Harsa.
- Petrus Soerjowinoto, (1988), Hakikat, Sebab dan Tipologi Korupsi, Semarang: Pranata. Th VIII.No.7.
- Soerjono Soekanto (1983), Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Pres.
- Soerjono Soekanto (2007), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiyono (2010), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, ( Bandung : Alfabeta.
- Wandi Haposan Sinurait (2019), Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Bahan Kimia di Perairan Belawan, Medan: UMSU.

Yudi, K. D. (2018). Teknik penyidikan dan pemberakasan tindak pidana korupsi. Yogyakarta:Penerbit Thafa Media.

### **Jurnal**

Amin Yusuf, Analisis Kebutuhan Pendidikan Masyarakat, Jurnal Penelitian Pendidikan Vol.31, No. 2, 2014.

Ahmad Ramadhan, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)”, melalui <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id>, diakses tanggal 23 Maret 2024, Pukul 12.30 WIB.

Fazar Ramadana , Ramadhan Rafsanjani,FAKTOR PENDORONG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) Januari 2021, Vol. 6, No. 1.

Natanael Israel Kumendong, Implikasi Perkembangan Alat Bukti Pada Pembuktian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen Volume X, Nomor 2, 2021 hal 133

Rifki Syahriah, “Efektivitas Penanganan Kasus Korupsi Oleh Kepolisian (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman)”, melalui <https://ojs.unm.ac.id>, diakses tanggal 24 Maret 2024, Pukul 12.20 WIB.

Sukendar Sukendar, Fontian Munzil, and Imas Rosidawati Wr., “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 1 (2015): 25–53, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.

Puji Wulandari Kuncorowati, “Peranan Aparat Penegak Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi,” Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan 2, no. 2 (2005): 1–9, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4377>.

Wantu, F., Tijow, L. M., & Yusuf, N. (2020). The Supervision In The Process Of Investigation And Investigation Of Corruption (Police And Prosecution). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 18 (2), 140-155

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 1 (2015): 25–53,  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2>.

### **Undang Undang**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Juknis BOS  
Reguler SD SMP SMA SMK Tahun 2021.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

### **Internet**

Tentang BOS <http://bos.kemdikbud.go.id/home/about> diakses tanggal 30  
november 2023 pukul 18.30

[https://kejari-binjai.go.id/berita/detail/sidang-tindak-pidana-korupsi-dalam-  
dugaan-perkara-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos](https://kejari-binjai.go.id/berita/detail/sidang-tindak-pidana-korupsi-dalam-dugaan-perkara-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos) 5 Agustus 2024  
pukul 18.30.

[https://kejari-binjai.go.id/berita/detail/peaetapan-dan-penahanan-tersangka-  
dugaan-](https://kejari-binjai.go.id/berita/detail/peaetapan-dan-penahanan-tersangka-dugaan-)

[https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/nprt/38/uu-no-31-tahun-  
1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/nprt/38/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi) 30 juli 2024

[https://kejari-binjai.go.id/berita/detail/penerangan-hukum-penkum-dilingkungan-  
satuan-pendidikan-kementerian-agama-kemenag](https://kejari-binjai.go.id/berita/detail/penerangan-hukum-penkum-dilingkungan-satuan-pendidikan-kementerian-agama-kemenag) diakses 21 Agustus 2024  
pkl 17.00.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### PEDOMAN WAWANCARA DAN SURAT BALASAN

##### a. Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi

Narasumber : Uli Arta Sitanggang,S.H.,M.H. Dan Staff KAPIDSUS

##### Kejaksaan Negeri Binjai

1. Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Binjai?
2. Apa Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Binjai dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah?
3. Apa Faktor Penghambat Kejaksaan Negeri Binjai dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Dibiinjai?

##### b. Surat Balasan dari Kejaksaan Negeri Binjai

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI  
JALAN T. AMIR HANZAH NO. 378 BINJAI 20740  
(001) 8821142 www.kejns-binjai.go.id

Nomor : B- 2578 A. 2.11/Cs.2/07/2024 BINJAI, 16 Juli 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Balasan Izin Riset

Yth.  
a.n. DEKAN  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelombagaan  
Di  
Medan

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum dengan nomor: B-2545/591.1/SH.V.3/PP.00.9/06/2024 perihal Surat izin riset, bersama dengan surat ini kami bersedia menerima mahasiswa yang namanya terlampir pada surat tersebut untuk melaksanakan riset di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Kejaksaan Negeri Binjai,  
  
JUFRI, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama NIP. 197401062000121002

Tembusan:  
1. Arsip.

Lampiran II



### Lampiran III

#### Daftar Riwayat Hidup

Penulis lahir di Binjai pada tanggal 30 Agustus 2002, anak ke dua dari dua bersaudara, merupakan putra dari Bapak Alm. Ulianta Bangun A.Md. dan Ibu Mauliani Afrianti S.Pd.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 023909 Binjai pada tahun 2014, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Binjai pada tahun 2017, kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di MAS AL WASHLIYAH 29 Binjai dan selesai pada tahun 2020.

Kemudian sejak 2020 penulis melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Hukum.

Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti beberapa kegiatan seperti magang di Kantor Hukum Ferdinan Siagian S.E,S.H.,M.H., praktek kerja lapangan di Kantor DPRD Kota Binjai, penyuluhan hukum di SMAN 17 Medan, praktek kerja lapangan di Pengadilan Negeri Medan dan praktek kerja lapangan di Pengadilan Agama Medan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN